

**ANALISIS HUBUNGAN KEMISKINAN TERHADAP AKSI PREMANISME
(Studi Kasus Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) Rajawali)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH

MUH IRFAN IDHAR

NIM : 10525025815

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1441 H /2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muh. Irfan Idhar, NIM. 10525025815 yang berjudul "**Hubungan Keiniskinan terhadap Aksi Premanisme (Studi Kasus Unit pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali**" telah diujikan pada hari Sabtu, 14 Jumadil Akhir 1441 H / 08 Februari 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

14 Jumadil Akhir 1441 H

Makassar,

08 Februari 2020 M

Dewan penguji :

Ketua	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., PhD	(.....)
Sekretaris	: Saidin Mansyur, S.S., M., Hum	(.....)
Anggota	: Wahidah Rustam S.Ag., M.H	(.....)
	: Hasanuddin, SE.Sy., ME	(.....)
Pembimbing I	: Saidin Mansyur, S.S., M., Hum	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Ferdinan, S.Pd.I., M.Pd.I	(.....)

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554612



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal Sabtu, 14 Jumadil Akhir 1441 H / 08 Februari 2020 M Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Su tan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Ba rwa saudara

Na ma

Nirn

Judul Skripsi

: Muh. Irfan Idhar

: 10525025815

: Hubungan Kemiskinan terhadap Aksi Premanisme (Studi Kasus Unit pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NIDN : 0931126249

Dra. Mustahidang Usman, M.Si

NIDN : 0917106101

Dewan Penguji :

1 Hurriah Ali Hasan, S.T.,M.E.,PhD

2 Saidin Mansyur, S.S.,M.,Hum

3 Wahidah Rustam S.Ag.,M.H

4 Hasanuddin, SE.Sy.,ME

Disahkan Oleh:

Dekan FMU Muhammadiyah Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554 612

PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Pernuh keasadarn, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan Gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Jumadil Akhir 1441 H

4 Februari 2020



Muh Irfan Idhar

ABSTRAK

Muh Irfan Idhar. 105 250 258 259 15. *Analisis hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme (Studi kasus Unit Pelayanan Tekhnis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali).* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Agama Islam. Dibimbing oleh Saidin Mansyur dan Ferdinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Kemiskinan, Tingkat Aksi Premanisme, dan untuk mengetahui hubungan Kemiskinan terhadap Aksi Premanisme di di Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan Fokus penelitian adalah kemiskinan dan aksi premanisme. Instrumen penelitian ada 3 (Tiga) yaitu; lembar observasi, pedoman wawancara dan catatan dokumentasi. Adapun teknik analisis data ada 3 yaitu; Reduksi data (*data Reduction*), penyajian data (*Data Display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*).

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: Tingkat kemiskinan di Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali dapat dilihat dari rendahnya pendapatan perbulan di bawah upah minimum reguler yang telah di tetapkan oleh yaitu minimal pendapatan kota adalah Rp; 2.860.382, Jika pendapatan seseorang dibawah dari yang tertera maka masuk dalam kategori miskin. Tingkat premanisme di Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali akan tetap tinggi jika kemiskinan masih tinggi, sebab pemicu utama aksi premanisme adalah ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan secara halal, ketidak merataan keadilan dimana-mana, mentalitas yang kurang dan lapangan kerja yang masih tergolong sangat kurang. Hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme di Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali adalah sebagai berikut;

- a. Mentalitas, kondisi hidup yang berada dalam ketidak mampuan atau berada dalam kemiskinan.
- b. Kurangnya modal menjadi bagian dari hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme.
- c. Kurangnya sikap saling tolong menolong dan ketidak perdulian satu sama lain.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur senantiasa kita ucapkan dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat, nikmat, dan inayahnya yang terus mengalir kepada manusia yang tiada terhenti. Bingkisan salam dan shalawat tetap tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat beberapa kekeliruan dan kekurangan didalamnya, baik dari segi sistematika penyusunannya maupun pembahasan sehingga terwujud masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya skripsi ini yang berjudul **“Hubungan Kemiskinan terhadap Aksi Premanisme (Studi Kasus Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali)”** Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah menyempatkan diri meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan baik sehingga berbagai harapan demi terwujudnya skripsi ini dapat tercapai.

Maka dari itu, melalui lembar kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik penulis untuk menyampaikan penghargaan yang sebaik-baiknya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis **Ibunda Hj. St. Johariah (alm)** dan **Ayahanda Muh Idris Mahid** yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan penulis hingga saat ini, selalu memberikan do'a, limpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terimakasih atas perjuangan ayah dan ibunda tercinta.
2. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim. SE.,M.M selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
3. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;

4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
5. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., M.E. selaku sekretaris jurusan hukum ekonomi syariah dan selaku kakanda yang telah mengarahkan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Ayahanda Saidin Mansyur, S.s., M. Hum selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam upaya penyusunan mulai proposal sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
7. Kakanda Wakil Dekan III Dr. Perdinan, S.Pd.I., M.Pd.I selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam upaya penyusunan mulai proposal sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya Fakultas Agama Islam yang telah banyak menuangkan ilmunya kepada kami.
9. Kakak Muh Ikhwan Idhar, Muh Ihsan Idhar dan Muh Ilham Idhar yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis baik secara moril dan materiil.
10. Kakak Ipar Miftahul Jannah, Irmawati dan Fitriani yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis baik secara moril dan materiil.
11. Keluarga besar Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah sangat membantu dalam proses penelitian.

Akhirnya, kepada Allah SWT. Penulis memohon semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Makassar, Jumadil Akhir 1441 H

4 Februari 2020

Muh Irfan Idhar



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
BERITA ACARA MUNAQASYAH	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Mamfaat Penelitian	7
BAB II: TINJAUAN TEORITIS	
A. Kemiskinan	
1. Pengertian kemiskinan	8
2. Pandangan Islam terhadap kemiskinan	12
3. Landasan Hukum	15
4. Jenis-Jenis Kemiskinan	17

5. Indikator kemiskinan	18
6. Faktor penyebab kemiskinan	18
7. Dampak kemiskinan	20
8. Usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan Di berbagai bidang	22
B. Aksi Premanisme	
1. Pengertian aksi premanisme	25
2. Landasan hukum aksi premanisme	28
3. Faktor penyebab terjadinya aksi premanisme	30
4. Macam-macam premanisme	32
C. Kerangka Konseptual	33
D. Kerangka pikir	35

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Objek Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Deskripsi Fokus Penelitian	36
E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik pengumpulan data	38
G. Teknik Analisis data	39

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian	41
B. Tingkat Kemiskinan di UPTD TPI Rajawali	48
C. Aksi Premanisme UPTD TPI Rajawali	57
D. Hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme Di UPTD TPI Rajawali	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
Daftar Pustaka	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke- Empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan, Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada

perkembangan masyarakat, perilaku, dan terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk.

Kemiskinan merupakan salah-satu problem pelik yang dihadapi umat manusia. Hasil survey yang dilakukan oleh Sam Mountford yang dirilis pada tanggal 17 Januari 2012 menempatkan isu tentang kemiskinan sebagai masalah krusial dibanding masalah-masalah lainnya. Masalah kemiskinan selalu menjadi penyakit yang menggelayuti setiap Negara, tidak terkecuali Indonesia.

Kompleksitas dari permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut kemiskinan itu sendiri melainkan juga implikasinya yang merasuk keseluruhan aspek kehidupan, tingkat keadaan kesehatan, sarana prasarana pendidikan, korupsi yang semakin merajalela, pengangguran dan PHK yang menjadi ketakutan setiap orang, di mana dampak besar berikutnya adalah terabaikannya kesejahteraan umat atau masyarakat.¹

Hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, Masalah ini

¹ Yusuf al-Qaradlawi. 2002. *Teologi Kemiskinan; Dokrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*. terj. Maimun Syamsuddin. Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 213

menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk.²

Badan pusat statistic (BPS) mencatat angka kemiskinan indonesia pada maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,14%, angka ini turun 0,53 juta orang dibanding september 2018 seiring dengan naiknya garis kemiskinan di indonesia.

Kepala Suharianto merincikan pada maret 2019 garis kemiskinan indonesia menjadi sebesar Rp.425.670 per kapita per bulan. Posisi itu mengalami peningkatan 3,55% dari garis kemiskinan September 2018 yang sebesar Rp.410.250 perkapita perbulan, juga naik sebesar 5,99% dibanding maret 2018 yang sebesar Rp.401.220. Dia mengatakan “jika rata-rata satu rumah tangga di indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan rata-rata secara nasional menjadi Rp 1.990.170 per rumah tangga perbulan” artinya, apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan dibawah itu masuk dalam kategori miskin. “Jadi orang yang akan di kategorikan miskin kalau pendapatan dibawah Rp 1.990.000. untuk mencari uang sebesar itu hampir Rp 2.000.000 bukanlah suatu hal mudah, apalagi garis kemiskinan di tiap daerah berbeda”.³

² G.W.Bawengan,1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, PT.Pradnya Paramita,Jakarta, h 89

³ Suharianto,2019. *Badan Statistik Pusat: Garis Kemiskinan Di Indonesia, Konfrensi Pers, Jakarta 15 Juli*.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sul-Sel menunjukkan jumlah warga miskin pada september 2018 menurun sebesar 46.330 jiwa. Kepala bidang statistik (BPS) Sul-Sel Fahrudin menyebut, saat ini jumlah warga miskin di Sul-Sel tercatat kurang lebih 779.640 jiwa. Sebelumnya, pada bulan september 2017 jumlah warga sulsel mencapai 825.970 jiwa dan mengalami penurunan sebesar 8.87%.

Jika dilihat dari daerahnya, jumlah penduduk miskin terbesar berasal dari desa yakni 620.940 jiwa atau sebesar 12,15%. Sedangkan di poerkotaan, warga miskin di Sulsel hanya mecapai 167.700 jiwa atau sebesar 4,48%. “Secara absolut selama periode september 2017 hingga september 2018, persentase penduduk miskin mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,28% dan 0,50%.⁴

Memperhatikan komponen garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan kemiskinan (GKBM), terlihat peranan komoditi makanan jauh lebih besr dibanding peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).

Pada bulan September 2017, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,95%, hal yang sama terjadi pada bulan September 2018

⁴ Fahrudin, 2019 Badan Pusat Statistik: angka Kemiskinan di Makassar menurun, Makassar h,2

peranannya juga relatif sama namun sedikit mengalami peningkatan menjadi 74,95%.

Peranan GKM terhadap GK untuk daerah perkotaan pada tahun September 2017 sebesar 68,93% naik menjadi 70,45% pada bulan September 2018, sedangkan untuk daerah pedesaan pada bulan September 2018 sebesar 78,52% mengalami penurunan sebesar 0,03% dari bulan september 2017 yang sebesar 78,55%.⁵

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk kualitasnya, Kondisi tersebut telah ikut menumbuhkan suburkan premanisme.⁶

Secara sosiologis, munculnya premanis medapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk material dan juga ketidak sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Di sini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar

⁵ Himas Puspito Putra, 2019. BPS: *Jumlah warga miskin di Sul-sel berkurang 46.000 jiwa*, *sinonews, Makassar*. H, 1-2

⁶ G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h 98

kelompok (*class*), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada dislokasi sosial individu atau kelompok tertentu didalam sebuah struktur masyarakat. Dislokasi ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat.⁷

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat Kemiskinan Di Unit Pelayanan Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Kota Makassar?
2. Bagaimana Tingkat aksi Premanisme Di Unit Pelayanan Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Kota Makassar?
3. Apakah Ada Hubungan Kemiskinan Terhadap Aksi Premanisme Di Unit Pelayanan Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Kota Makassar?

C. Tujuan

⁷ G.W.Bawengan,1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, h 98,112.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui tingkat kemiskinan Di Unit Pelayanan Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Kota Makassar?
2. Untuk mengetahui tingkat Aksi Premanisme Di Unit Pelayanan Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Kota Makassar?
3. Untuk Mengetahui Hubungan Kemiskinan Terhadap Aksi Premanisme Di UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik secara praktis, maupun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis; Yaitu bermanfaat bagi masyarakat dan penulis sendiri untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan penelitian, serta dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa prodi hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada umumnya serta hasil penelitian berguna sebagai bahan kajian untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan suatu *Hubungan Kemiskinan Terhadap Aksi Premanisme*.
2. Kegunaan praktis; hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk memberikan masukan kepada masyarakat pada umumnya dan

para pemerintah dan penegak hukum khususnya untuk dapat menanggulangi atau meminimalisir kemiskinan dan aksi –aksi premanisme yang selama ini menjadi penyakit bagi bangsa indonesia yang belum terselesaikan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut kamus ilmiah populer kemiskinan itu berasal dari kata *daras miskin* yang berarti tidak berharta (hartanya tidak mencukupi kebutuhannya); serba kekurangan.⁸

Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi belaka, melainkan juga bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non ekonomi, sosial, budaya dan politik. Karena sebab multidimensional tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial. Dalam diskursus mengenai kemiskinan ini sendiri, ada tiga pandangan yang berkembang, yaitu konservatisme, liberalisme dan radikalisme.

Penganut masing-masing pandangan memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum konservatis memandang bahwa kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras, boros, tidak mempunyai

⁸ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, 1994. *Kamus Ilmiah Populer* (Edisi Pertama, Yogyakarta, Arkola). h. 472.

rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis dan tidak ada hasrat untuk berprestasi.

Menurut Oscar Lewis, orang-orang miskin adalah kelompok sosial yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup psikologis, sosial dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam realistik dan situasional adaptation pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Sedangkan kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif.⁹

Implikasi kemiskinan yang melibatkan pandangan-pandangan tersebut menjadikan kemiskinan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Memahami kemiskinan tentunya tidak hanya dapat dilihat dari satu segi dan satu sudut pandang saja, melainkan harus mampu membacanya dalam kerangka multi disipliner yang komprehensif. Secara sederhana, sebagaimana yang dinyatakan oleh Parsudi Suparlan (2017), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang

⁹ Agus. Sjaafari, 2014 *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu). h, 98

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, standar pendidikan, tingginya kriminalitas dan lain sebagainya yang muncul dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun, belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan ini dalam satu definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Terlepas dari pro kontra dan perdebatan mengenai konsep kemiskinan, namun isu kemiskinan tetap menjadi isu yang sangat penting.¹¹

Menurut Nugroho dan Dahuri, kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, dan struktural. Lebih lanjut, Peter Townsend dalam Usman dikemukakan bahwa

¹⁰ Suparlan, Parsudi, 1995. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995. h. 1

¹¹ Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, 2008. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, h. 68.

konsep kemiskinan dibagi menjadi tiga macam, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subjektif.¹²

Kemiskinan absolut biasanya diukur dan dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkrit. Ukuran tersebut lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan.

Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standart*, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah belum tentu kemiskinan di daerah lain. Demikian juga kemiskinan di masa tertentu, belum tentu disebut sebagai kemiskinan di masa yang lain.

Konsep kemiskinan subjektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep yang ketiga ini tidak mengenal *a fixed yardstick* dan juga tidak memperhitungkan *the idea of relative standart*. Kelompok masyarakat yang menurut ukuran kita berada di bawah kemiskinan, boleh jadi masyarakat tersebut tidak pernah menganggap diri mereka berada di dalam kemiskinan. Demikian juga sebaliknya, kita menganggap mereka tergolong mampu, namun mereka meletakkan diri mereka pada kelompok tidak mampu.¹³

¹² Iwan Nugroho & Rochmin Dahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES). h, 165-168.

¹³ Sunyoto Usman, 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). h, 125

Istilah kemiskinan selalu dilawankan dengan kaya, sebagaimana kata rakyat yang selalu dilawankan dengan penguasa. Kendati pun tidak disepakati, namun ada kesan bahwa kemiskinan identik dengan rakyat, sedangkan kaya identik dengan penguasa. Dalam pandangan Asy'ari, kata rakyat adalah abstrak dan baru dapat dipahami apabila kata tersebut telah dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi dan politik.¹⁴

2. Pandangan Islam terhadap Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau ada yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural).

Prioritas pengentasan kemiskinan, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, di mana dalam pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, Hampir 70 tahun sudah konstitusi tersebut digagas,

¹⁴ Musa Asy'ari, 2001. *Keluar dan Krisis Multidimensi* (Yogyakarta: LESFI). h. 50.

namun dalam realitas yang dihadapi, kemiskinan makin meningkat tajam sedangkan upaya untuk menanggulangnya masih jauh dari harapan dan tidak sebanding dengan lonjakan tingkat kemiskinan yang terjadi. Kemiskinan bahkan menjadi wacana yang paling krusial ketimbang wacana lainnya, misalnya, iklim, terorisme, dan perang. Berdasarkan data yang dirilis Sam Mountford, prosentasi survey adalah sebagai berikut;

Kemiskinan ekstrim 71%, lingkungan 64%, meningkatnya harga pangan dan energi 63%, terorisme dan HAM serta penyebaran penyakit 59%, ekonomi dunia 58%, dan isu perang 57%.¹⁵

Kemiskinan adalah akar kata dari “miskin” dengan awalan *ke* dan akhiran *an* menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan “kefakiran” yang berasal dari asal kata “fakir” dengan awalan *ke* dan akhiran *an*. Dua kata tersebut seringkali juga disebutkan secara bergandengan, yakni kata “fakir miskin” dengan pengertian orang yang sangat kekurangan.¹⁶

Tentang dua golongan yang pertama, yaitu fakir dan miskin para ahli berbeda pendapat, ada yang mengemukakan bahwa dua golongan tersebut pada hakikatnya adalah sama. Demikian pendapat Abu Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Qasim pengikut Imam Malik. Berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama, sebenarnya keduanya adalah dua golongan

¹⁵ Musa Asy'ari, 2001. *Keluar dan Krisis Multidimensi* (Yogyakarta: LESFI). h. 50.

¹⁶ Lukman Ali, Dkk. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), h. 273 & 660.

tetapi satu macam, yakni dalam hal kondisi kekurangan dan dalam kebutuhan. Para ahli tafsir dan ahli fikih juga berbeda pendapat dalam memberi definisi kedua kata tersebut. Yusuf al-Qardhawi memberikan perumpamaan bahwa kedua kata tersebut seperti Islam dan Iman, jika dikumpulkan terpisah, yakni masing-masing mempunyai arti tersendiri, dan jika dipisah terkumpul, yakni bila salah satu disebutkan sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai arti buat kata lain yang sejajar.¹⁷

Al-Raghib al-Ashfahaniy, menyebutkan empat macam pengertian fakir. *Pertama*, fakir dalam arti orang yang memerlukan kebutuhan hidup yang primer, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan. *Kedua*, fakir dalam arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. *Ketiga*, fakir dalam arti fakir jiwanya. Ini termasuk golongan fakir yang paling buruk karena dapat mendorong orang itu kepada kekafiran. *Keempat*, fakir dalam arti orang yang selalu merasa butuh kepada petunjuk dan bimbingan Tuhan, sehingga orang tersebut tidak merasa sombong.

Lebih lanjut, Sayid Sabiq menjelaskan bahwa fakir miskin disebut secara bersamaan dengan menggunakan huruf *waw al'ataf* (kata sambung), sebagaimana dijumpai dalam QS. at-Taubah ayat 60, menunjukkan bahwa

¹⁷ Sayid Sabiq, 1983. Fiqh Sunnah, Jilid I (Beirut: Dar Al-Fikr). h. 324.

miskin adalah bagian dari fakir, atau orang miskin itu pada hakikatnya adalah orang fakir juga, tetapi ia memiliki ciri-ciri yang khusus.¹⁸

3. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum kemiskinan adalah:

a. Al-Quran

وَوَجَدَكَ غَائِلًا فَأَغْنَىٰ

Terjemahannya:

“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan”.¹⁹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا لِمَنِ الضَّالِّينَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ

Terjemahannya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S Al-Baqoroh 2/198).²⁰

b. Hadist

¹⁸ *Ibid.* h.325.

¹⁹ Syamil Quran.2004 *Al-quranul Karim*. Syaamil Cipta Media, Bandung, h, 586

²⁰ Arif Budiman, *Al-Manhaj: Tafsir Surah Adh-Dhuha (Al- Manhaj Salafus Sahlih. Jakarta) h, 753*

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ ، مِنْ عَرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ »
رواه البخاري

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassallam sabdanya: “Barangsiapa yang di sisinya ada sesuatu dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik yang mengenai keperwiraan saudaranya itu atau pun sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini – semasih di dunia, sebelum tidak lakunya wang dinar dan dirham. Jikalau -tidak meminta kehalalannya sekarang ini, maka jikalau yang menganiaya itu mempunyai amal shalih, diambillah dari amal shalihnya itu sekadar untuk melunasi penganiayaannya, sedang jikalau tidak mempunyai kebaikan sama sekali, maka diambillah dari keburukan-keburukan orang yang dianiayanya itu, lalu dibebankan kepada yang menganiayanya tadi.” (Riwayat Bukhari).²¹

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

Artinya :

“Kaya itu bukanlah lantaran banyak harta. Tetapi, kaya itu adalah kaya jiwa.” (HR Bukhari dan Muslim).²²

Banyaknya harta dan kekayaan bukanlah jalan untuk meraih kebahagiaan tetapi orang yang kaya selalu merasa tidak puas dengan apa yang diberi dari Allah, orang seperti ini selalu menambah harta ia tidak peduli

²¹ Muhammad Fais Almath, 1991, *1100 Hadist Terpilih*. Gema Insani Press. Bogor h,12

²² *Ibid.* h,54

dengan dari manakah harta itu berasal, dan orang yang seperti ini adalah orang yang fakir karena usaha kerasnya untuk terus menerus berusaha untuk memuaskan diri dengan harta. Dan yang perlu di kecam baik-baik adalah hakikat kekayaan itu adalah kekayaan hati, orang yang kaya hati inilah yang selalu merasa cukup dengan apa yang diberi kepadanya dan bahagia serta ridho dengan keadaan atau taqdir yang telah diberikan kepadanya. Dan orang yang kaya hati tidak merasa tamak untuk menambah harta dan dia tidak seperti orang yang letih untuk terus menambah hartanya.

4. Jenis-Jenis Kemiskinan

a. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dapat di pengaruhi oleh pakem kebijakan pemerintah dalam membangun perekonomian Dimana hasil pemerataan pembangunan ekonomi belum mencapai lapisan masyarakat terbawah sehingga gradasi sejahtera nampak sangat mencolok terkait jumlah penghasilan dalam standar minimum. Dimana standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu.

b. Kemiskinan Absolut

Secara statistik, kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang di perlukan untuk kehidupan. Kebutuhan pokok minimum yaitu ukuran finansial

dalam bentuk uang, garis kemiskinan diukur dalam bentuk jumlah pendapatan yang dihasilkan dalam satu periode, apabila pendapatan tersebut berada di bawah garis yang ditetapkan, maka dapat tergolong kategori miskin.²³

5. Indikator kemiskinan

Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
- b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- c. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
- f. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

²³ Sunyoto Usman, 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 125

- g. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- i. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).²⁴

6. Faktor Penyebab Kemiskinan

- a. Tingkat pendidikan yang rendah

Faktor pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang mana jika tidak terpenuhi akan menjadi bom yang menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang di perlukan dalam kehidupan yang berakibat pada keterbatasan kemampuan untuk memasuki dunia kerja.

- b. Faktor malas bekerja

Ini merupakan penyakit yang sering sekali menyakiti seseorang untuk maju dan merubah nasibnya.

- c. Terbatasnya lapangan kerja

Ketidak stabilan ekonomi dan arah politik serta kebijakan sebuah negara maupun wilayah akan langsung membawa konsekuensi keterbatasan lapangan kerja yang berdampak langsung pada kemiskinan.

²⁴ Suharto, Edi. 2009. Jurnal: *Menengok Kriteria Kemiskinan di Indonesia: menimbang indikator kemiskinan berbasis hak*. Vol 14 no 2. September. h, 36

d. Keterbatasan modal

Sebuah idiom klasik ketika memutuskan merubah taraf hidup untuk lebih baik dan tidak memiliki modal dalam menerapkan keterampilan yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu.

e. Ketergantungan

Fakta di lapangan menyebutkan bahwa santunan belum tentu sepenuhnya menyelesaikan masalah kemiskinan! Ketika orang miskin 'terbiasa' diberi donasi, akan sulit bagi mereka mandiri secara finansial. Mental mereka adalah mental 'menerima', sedangkan solusi bagi kemiskinan adalah pekerjaan dan pendidikan.

f. Ketidak Jujuran

Secara garis besar, hal inilah yang menjadi penyebab utama kemiskinan di Indonesia sulit untuk dihilangkan. Selama pejabat pemerintahan dari tingkat yang terendah hingga tingkat pusat hanya berpikir untuk memperkaya dirinya sendiri, maka akan selalu ada orang miskin. Yang menyedihkan, penyebab kemiskinan satu ini tidak hanya menitikberatkan pada nominal angka yang dikorupsi.

g. Beban Keluarga

Merupakan permasalahan yang sangat serius ketika banyaknya jumlah anggot keluarga dan tidak di imbangi dengan peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan, karena seiring banyaknya

anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan dan beban hidup yang harus di penuhi.²⁵

7. Dampak kemiskinan

a. Memicu tindak kriminal

Karena keterbatasan ekonomi, masyarakat miskin akan cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Termasuk dalam hal ini melakukan tindak kejahatan seperti merampok, mencuri, melakukan penipuan, begal, hingga pembunuhan.

b. Depresi

Minimnya penghasilan yang dibarengi dengan harga kebutuhan pokok yang semakin melonjak seringkali mengakibatkan masyarakat miskin mengalami depresi. Secara pengertian, depresi bisa diartikan sebagai perasaan sedih berkepanjangan yang dialami oleh seseorang sehingga memberikan dampak negatif terhadap pikiran, perasaan, tindakan, dan kesehatan mentalnya.

c. Menimbulkan konflik

Dampak kemiskinan selanjutnya adalah masih berkaitan dengan depresi, gejala lain yang juga dapat dialami oleh individu yang sedang mengalami depresi adalah cenderung mudah marah dan tersinggung. Menambah Pengangguran.

²⁵ F, Felicia. 2017. *Penyebab meningkatnya kemiskinan*. Bappenas. Jakarta. h,2

Pengangguran juga nyatanya ikut termasuk ke dalam daftar panjang dampak negatif kemiskinan, Individu yang 'nganggur' otomatis tidak memperoleh penghasilan, yang kemudian mengakibatkan yang bersangkutan menjadi miskin.

d. Kurang dan sulit mendapatkan pendidikan

Seperti yang sudah di jelaskan diatas, orang miskin umumnya tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang ujung-ujungnya malah memperparah dampak kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

e. Meningkatkan angka kematian

Minimnya penghasilan masyarakat miskin otomatis mengakibatkan mereka kesulitan dalam merawat diri dan memperoleh pengobatan yang sesuai di kala sakit.²⁶

f. Menyebabkan kekurangan nutrisi dan gizi buruk

Tidak memadainya penghasilan yang diperoleh orangtua membuat mereka terpaksa harus membesarkan dan merawat anak-anak mereka dengan asupan nutrisi yang seadanya saja.

g. Anak terlantar

Salah satu dampak kemiskinan seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian ketiga adalah menimbulkan konflik. Perseteruan atau cekcok yang

²⁶ Daniel. 2013. *Pemerhati Kota: Kota Makassar dan Lingkaran Kemiskinan* (Tribun Timur). h,2

terjadi antara suami-istri merupakan satu contoh konflik yang sangat mungkin diakibatkan oleh kemiskinan. Lagipula rasanya sulit untuk tidak cekok di tengah situasi yang 'tertekan' secara ekonomi.²⁷

h. Terbentuknya Pola Pikir Pesimis

Dampak kemiskinan yang terakhir adalah dapat terbentuknya pola pikir yang pesimis pada masyarakat miskin. Mereka yang kesehariannya hidup serba kekurangan pastinya lama kelamaan akan percaya bahwa dirinya tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Tidak mungkin keluar dari jerat kemiskinan dan sukses seperti kehidupan keluarga beberapa teman mereka yang kaya.

8. Usaha Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan dari beberapa bidang

Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang tugasnya untuk mensejahterakan rakyatnya sudah sepatutnya mengurus dan mengambil solusi akibat dari kemiskinan adapun usaha usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan secara umum adalah seperti;

a. Bidang social

Pemerintah sudah berupaya dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara mengadakan Bantuan langsung Tunai(BLT) kepada rakyat yang kurang mampu, memberikan sandang pangan, menyediakan bahan pokok makanan yang murah bagi rakyat miskin(seperti beras bulog), mensubsidi

²⁷ Bappenas. 2015. *Strategi Nasional penanggulagn kemiskinan. Sekretariat kelompok kerja perencanaan makro penanggulangan kemiskinan. h,1*

BBM(Pertamina),dan akhir akhir ini seperti pembagian kompor gas untuk kalangan tidak mampu dan masih banyak lagi.

b. Bidang kesehatan

Di dalam bidang kesehatan pemerintah juga terus berupaya dalam memerangi kemiskinan dengan cara menyediakan Askes untuk orang yang tidak mampu,mengadakan obat Generik yang harganya dapat di jangkau oleh masyarakat kurang mampu,memberikan susu instan dan makanan untuk anak balita yang tumbuh di bawah garis merah(kurang gizi) dan masih banyak lagi.

c. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sebuah negara tanpa adanya pendidikan negara yang kaya akan Sumber daya Alam pun tidak akan berkembang,karna tidak adanya pengelolanya.dari segi pendidikan pemerintah terus memberikan bantuan baik bantuan dalam bidang sekolah Seperti Dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) hingga menganalokasikan dana APBN sebesar 20% untuk dana pendidikan,walaupun dana tersebut tidak tepat sasaran yang di akibatkan oleh adanya oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penyebab kegagalan Program Penanggulangan Kemiskinan Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yaitu adalah:

- a) Program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya-biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
- b) Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.²⁸

²⁸ Bappenas. 2015. *Strategi Nasional penanggulagn kemiskinan. Sekretariat kelompok kerja perencanaan makro penanggulangan kemiskinan. h,1*

Kesimpulan dari usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dari beberapa bidang diatas dapat dilihat dari usaha pemerinta dalam mengatasinya dalam hal ini Dinas sosial yang merupakan instansi yang lebih dekat dan lebih paham mengenai kemiskinan di makassar dan program yang di lakukan pemerintah kota makassar adalah salah-satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan ini di peruntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu seperti memberikan kebutuhan berupa sandang, pangan, menyediakan bahan pokok yang murah untuk masyarakat, lalu di bidang kesehatan dimana pemerintah juga sedang memerangi kemiskinan dengan cara menyediakan kartu berobat yang gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan terakhir adalah di bidang pendidikan dalam hal ini pemerintah kota makassar sadar akan pentingnya pendidikan apalagi di negara yang kaya akan sumber daya manusianya. Adapun yang dilakukan pemerintah kota makassar adalah dengan memberikan dana APBN sebesar 20% untuk dana pendidikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Aksi Premanisme

1. Pengertian Aksi Premanisme

Preman adalah partikelir swasta, penodong, perampok, pemeras dan seterusnya. Premanisme adalah cara atau gaya hidup seperti preman dengan mengedepankan kekerasan.²⁹

²⁹ Ida Bagus Pujastawa dalam Ali Mustofa Akbar. 2011. *Premanisme Dalam Teori Labeling*. h, 4

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil preman (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, preman (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran)).³⁰

Apapun wajah dan bentuk premanisme, semuanya dikaitkan oleh satu sifat yaitu melibatkan ancaman, intimidasi atau kekerasan. Akibatnya, premanisme melahirkan dampak yang besar, menelan banyak korban nyawa, luka-luka dan harta benda. Muncul ancaman terhadap rasa aman dan ketidaknyamanan hidup bermasyarakat. Rasa was-was dan takut menghantui masyarakat.

Preman adalah orang / individu dan atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya. Karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang, namun karena dia melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan fisik

³⁰ Ida Bagus Pujastawa dalam Ali Mustofa Akbar. 2011. *Premanisme Dalam Teori Labeling*. h,5

maupun psikis, agar mereka mau mendukung kebutuhannya. Sikap, tindakan, perilaku para preman itulah yang disebut sebagai premanisme.³¹

Aksi premanisme terjadi dalam berbagai wajah mulai preman individual sampai yang terorganisir dalam kelompok dan tak sedikit yang menggunakan baju organisasi atau perusahaan legal bahkan menjadi semacam sindikat atau mafia.

Perkembangan selanjutnya, perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif karena dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Pelaku premanisme juga cenderung menunjukkan sikap-sikap yang berlawanan, mengabaikan, dan melanggar peraturan yang berlaku.

Di masa lalu, preman (vrije man) adalah pelindung masyarakat dari tindakan sewenang-wenang kaki tangan penjajah. Vrije man juga sering muncul sebagai pembela para buruh kontrak asal Jawa, Cina, India yang disiksa para centeng. Setiap warga yang mendapat kesulitan dari suruhan Belanda atau tukang kebun (centeng), sering mendapat perlindungan dari para vrije man.

Premanisme diartikan sebagai cara atau gaya hidup seperti preman, biasanya mengedepankan kekerasan. Pada kondisi demikian, kelompok masyarakat usia kerja mencari cara untuk mendapatkan

³¹ Kunarto. *Kejahatan Berdimensi Baru*, 1999. (Jakarta: Cipta Manunggal.) h, 252

penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Definisi lain menyebutkan bahwa preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.³²

2. Landasan Hukum Aksi Premanisme

a. Al-quran

Terjemahannya:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
“Wahai ahli Kitab, janganlah kalian bertindak melewati batas (ghuluw) dalam agama kalian”.³³

Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya Allah sangat melarang sikap melampaui batas dan menyenjung secara berlebihan, hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang nasran, karena sesungguhnya mereka melampaui batas.³⁴

³² Rahmawati, L. *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme* Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa (Studi Sosio Kriminologi, 2002). h, 14

³³ Syamil Quran. 2004 *Al-quranul Karim*. Syaamil Cipta Media, Bandung h, 105

³⁴ Tafsir Ibnu Katsir. Surah an-nisa (Al-quran Mulia, Jakarta) h, 268

b. Hadist

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ

Artinya :

“Hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas (ghuluw) dalam beragama sebab sungguh ghuluw dalam beragama telah menghancurkan orang sebelum kalian” [HR. An-Nasâ'i dan Ibnu Mâjah].³⁵

Sikap ghuluw adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat islam. Sikap ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya, juga tidak akan mendatangkan buah hasil yang baik dalam segala urusan, terlebih dalam urusan agama. Untuk itu kita harus menjauhi sikap ghuluw dalam agama, baik keyakinan maupun agama, dan hendaknya kita waspada.

النَّهْبُ بِمَعْنَى الْأَخْذِ بِالْقَهْرِ وَالْغَلْبَةِ عَلَى وَجْهِ الْعَلَانِيَةِ

Artinya:

“An-Nahab: Mengambil harta secara paksa dengan menindas (korban) secara terang-terangan” (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah).

Kesimpulan hadist diatas adalah mengambil harta secara paksa dengan menindas dan terang-terangan, serta penindasan menggunakan

³⁵ Hadist Shahih, Diriwayatkan Oleh An-Nasa'i(V/268), Ibnu Majah (3029) Dan Ahmad (1/215), Al-Hakimi Mengatakan Shahih Sesuai Syarat Al-Bukhari Dan Muslim Dan Di Setujui Oleh Adz-Dzahabi, Fathul Bari XII Tulisan Ibnu Hajar.

kekuatan adalah salah- satu bentuk kejahatan yang harus diberi hukuman yang dimana hukumanna diberikan kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka dan sesuai dengan kejahatan yang di lakukannya.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Premanisme.³⁶

a. Faktor mendasar

yaitu penerapan ideologi sekulerisme kapitalisme. Sekulerisme memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Dengan sekulerisme faktor keimanan dinihilkan. Hilanglah faktor kontrol diri yang paling kuat, Maka perisai diri untuk tidak berbuat jahat pun menjadi sedemikian tipis bahkan tidak ada.

b. Faktor ekonomi.

Sulitnya mencari penghidupan akibat tidak adanya lapangan kerja sementara tuntutan biaya hidup sedemikian tinggi akhirnya mendorong sebagai orang terjun dalam dunia premanisme. Akibat sistem ekonomi kapitalisme, kekayaan tidak terdistribusi secara merata dan adil. Kekayaan terkonsentrasi kepada segelintir orang. Bahkan kekayaan negeri ini banyak lari demi kesejahteraan asing. Pemerintah pun akhirnya tidak berdaya menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi rakyat karena tidak punya biaya.

³⁶ Soerjono,soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta, Rajawali)* h.32

c. Karena penegakan hukum yang lemah.

Aparat tidak bertindak tegas. Aneh jika pergerakan dan eksistensi kelompok preman yang begitu terasa dan kasat mata tidak diketahui oleh aparat. Ada anggapan, keberadaan preman justru dipelihara oleh (oknum) aparat. Kesan melindungi dan melakukan pembiaran itu terlihat ketika polisi baru bisa bertindak setelah terjadi aksi kekerasan yang meresahkan banyak orang. Padahal, polisi sudah mencium indikasi bakal ada kekerasan itu sejak awal.

d. Semua itu makin diperparah oleh sistem hukum di negeri ini yang tidak bisa memberikan efek jera.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap preman yang terlibat bentrokan bahkan pembunuhan begitu ringan. Hukum bisa diperjual belikan sehingga para preman yang diajukan ke pengadilan pun bisa lolos dari jerat hukuman, Jika pun mereka akhirnya dijatuhi hukuman dan dipenjara, nyatanya mereka masih bisa mengendalikan bisnis premaninya di dalam penjara.³⁷

e. Anonimitas

Terlalu banyak rangsangan indra dan kognitif membuat dunia menjadi sangat impersonal, artinya antara satu orang dengan orang lain tidak lagi saling mengenal. Lebih jauh lagi, setiap individu cenderung menjadi

³⁷ Buletin Da'wah Islam. (dalam catatannya) *Premanisme Merajalela, Penerapan Syariah Islam dan Solusinya*. <http://www.bringislam.web.id .h,592>. Di akses pada tanggal 15 Januari 2019

anonim (tidak mempunyai identitas diri). Suhu udara yang panas. Suhu lingkungan yang tinggi memiliki dampak terhadap tingkah laku sosial berupa peningkatan agresifitas.

f. Alkohol dan obat-obatan

Ada petunjuk bahwa agresi berhubungan dengan kadar alkohol dan obat-obatan. Subyek yang menerima alkohol dalam takaran yang tinggi menunjukkan taraf agresifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan subjek yang tidak menerima alkohol atau menerima alkohol dalam taraf yang rendah.

4. Macam-macam Premanisme

a. Premanisme tingkat profesional.

Premanisme yang dilakukan dengan cara terorganisir dan berlandung dibawah organisasi masyarakat atau partai politik dan difasilitasi dengan dana yang memadai. premanisme jenis ini biasanya sangat sulit diberantas, karena mendapat perlindungan dari kelompok yang mempunyai hubungan politik dengan sebagian oknum pejabat pemerintah. Premanisme dalam tingkat ini bercirikan 'berseragam' dan tidak seperti preman – preman jalanan. Preman dalam tingkat profesional ini umumnya disewa dan dibayar oleh sebuah lembaga atau instansi tertentu untuk merampas sesuatu yang berharga dari masyarakat dengan politik tipu daya.

b. Premanisme tingkat amatir.

Premanisme yang terdiri dari beberapa orang atau bergabung dalam sebuah kelompok yang memeras atau meminta 'setoran' kepada para pedagang, supir, pembeli dan masyarakat kecil di tempat – tempat umum seperti stasiun, pasar, dan terminal.

c. Premanisme tingkat bulu atau kelas teri.

Premanisme tingkat ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang kehilangan pekerjaannya akibat PHK atau yang tidak memiliki pekerjaan, yang disebut pengangguran. Para pelaku premanisme tingkat ini, umumnya melakukan tindak premanisme hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep - konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.

Dari judul proposal yang dibuat oleh penulis yakni “*Hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme studi kasus Di UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Kota Makassar* “ agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman atau penafsiran yang ditujukan untuk

memberikan kesatuan pemahaman, maka penulis membuat batasan konsep dalam penelitian ini antara lain :

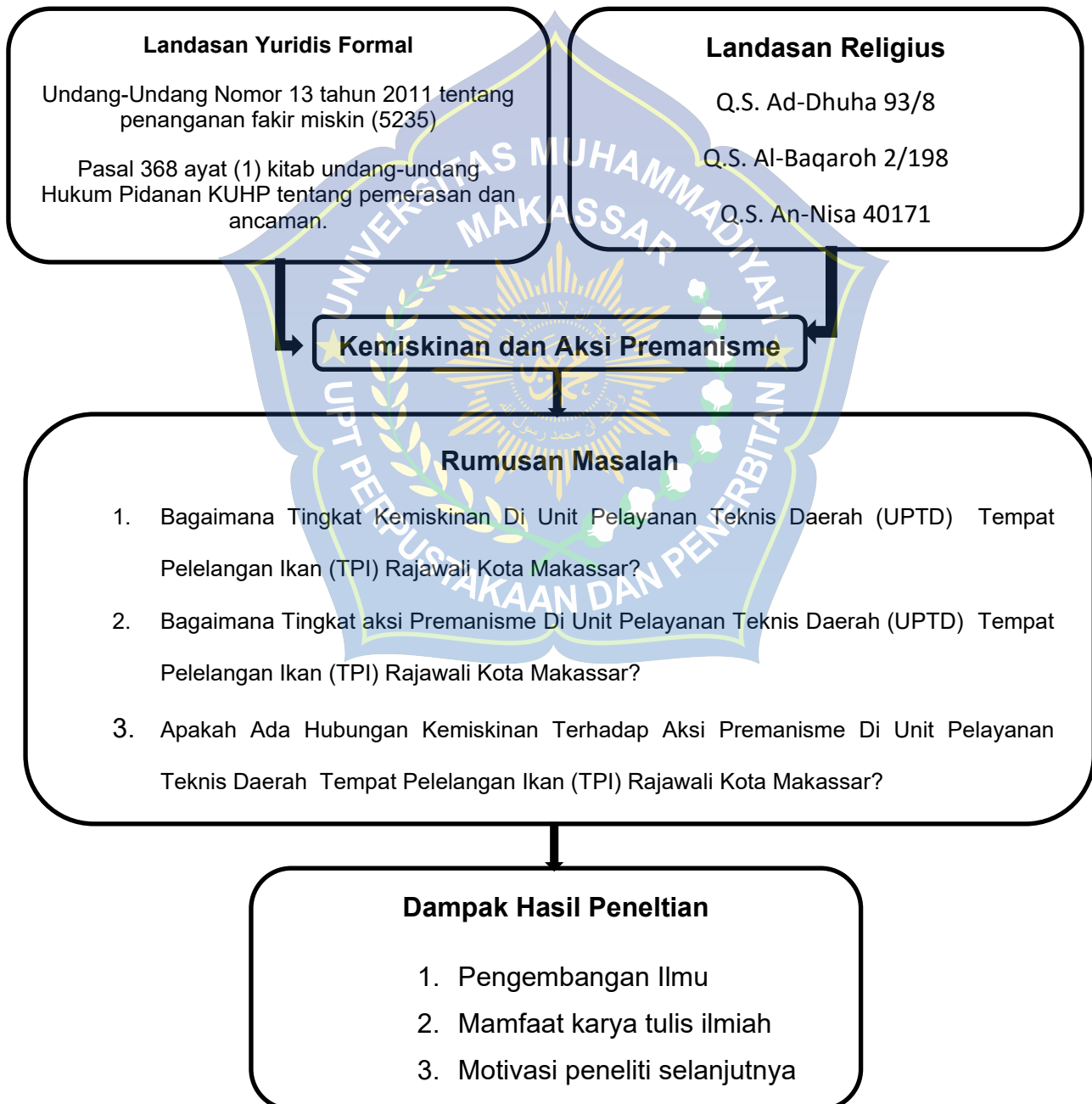
1. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang berhubungan erat dengan kualitas hidup.
2. Pandangan kemiskinan dalam islam yaitu faqir, miskin, al-sail, dan al-mahrum..
3. Premanisme Berasal dari kata „vrijman“ Bahasa Belanda yang artinya adalah Orang bebas, merdeka dan isme adalah aliran. Premanisme adalah perilaku yang menimbulkan tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat..³⁸
4. Kriminologi adalah merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu..³⁹
5. Di UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Kota Makassar adalah wilayah / Lokasi yang akan penulis teliti.

³⁸ March F. Makaampoh, artikel. *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, h 4 Di akses pada tanggal 19 Januari 2019

³⁹ Moeljatno. 1986. *Kriminologi*. Bina aksara: Jakarta,hal.6

6. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan di sebuah topik penelitian yang menjadi kriteria utama dalam membuat suatu kerangka pikir agar dapat menyakinkan kepada orang bahwa alur-alur pemikiran logis yang dapat memudahkan membuahkan kesimpulan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis Kualitatif yakni berusaha mendeskripsikan dan menganalisa mengenai hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme. Penelitian deskriptif menyajikan data-data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan judul.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali yang terletak di Jalan Rajawali No.8.A, Kunjung Mae, kec. Mariso, Kota Makassar dengan Kode Pos 90123, Sulawesi Selatan.

Disini peneliti akan berusaha meneliti hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme, Adapun Objek dalam peneltian ini adalah kemiskinan dan aksi premanisme.

C. Fokus Penelitian

Adapun Fokus penelitian ini adalah:

1. Kemiskinan
2. Aksi Premanisme

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yaitu:

1. Kemiskinan

Kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang menggambarkan suatu problematika hidup yang diwujudkan dengan kondisi masyarakat di tempat penelitian (Unit Pelayanan Teknis dinas (UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali), dan juga penelitian ini difokuskan kemiskinan dalam tataran struktural yakni dimana kondisi kemiskinan yang terjadi merupakan akibat dari kebijakan yang dianggap tidak adil.

2. Aksi premanisme

Aksi premanisme yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah aksi premanisme yang berhubungan dengan suatu kondisi kehidupan yang dapat di wujudkan di lokasi penelitian (UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali), dimana penelitian ini akan di fokuskan pada aksi premanisme dalam lingkungan masyarakat akibat dari kebijakan dan kehidupan yang berlatar serba kekurangan serta kebutuhan yang banyak.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun instrumen penelitian yaitu:

1. Lembar Observasi

Lembar Observasi adalah pedoman yang berisikan langkah-langkah untuk melakukan penelitian mulai dari merumuskan masalah, kerangka

teori untuk menggambarkan perilaku yang di teliti, prosedur dan tehnik kriteria analisis.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah alat bantu yang di gunakan dalam melakukan tanya jawab di tempat penelitian seperti memuat teks pertanyaan, alat rekam dan lain-lain.

3. Catatan Dokumentasi

Catatan dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain- lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber Dokumen ada 2 yaitu, *Pertama*, Dokumen Primer yaitu data yang diperoleh dari informan. *Kedua*, *Dokumen Sekunder* Yaitu data yang diperoleh selain dari informan atau media seperti surat kabar, laporan penelian, publikasi dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah dengan metode sebagai berikut:

2. Observasi

Teknik observasi di gunakan untuk memahami pola, norma, dan makna perilaku dari informan yang diteliti.

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam metode wawancara sering digunakan bersamaan dengan teknik observasi, memberikan pertanyaan untuk mendapatkan data primer.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam teori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian diatas tersebut.

Adapun kegiatan dalam analisis data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini memiliki 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Adalah proses pemulihan, pemberian focus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Adalah susunan informasi yang terorganisir, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan memeriksa penyajian data akan memudahkan memakna siapa yang harus dilakukan (analisis lebih lanjut / tindakan) yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah teksuraian.

3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran menganalisis selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat, dan keluarga peneliti untuk mengembangkan “kesempatan intersubjektif”, dengan kata lain makna yang muncul dari kata harus teruji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya (validitasnya).

Kesimpulan akhir baru ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus yang diteliti. Kemudian kesimpulan yang telah ditarik dan diverifikasi baik dengan kerangka berfikir peneliti maupun dengan catatan lapangan yang ada hingga tercapai konsesus pada tingkat optimal pada peneliti dengan sumber-sumber informasi maupun dengan kolega peneliti sehingga diperoleh validitas dan akuratisasinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya UPTD Tempat Pelelangan ikan (TPI) Rajawali

UPTD TPI Rajawali berdiri pada Tahun 1969 dan diresmikan pada Tahun 1970. UPTD TPI Rajawali juga termasuk dalam unsur pelaksana teknis di bidang perikanan yang menjadi pusat pengembangan masyarakat nelayan sekaligus tempat pembinaan mutu hasil perikanan. Sesuai dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 62 Tahun 2015 Tanggal 26 Oktober Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Usaha maka di UPTD TPI Rajawali dilakukan penarikan retribusi ikan, sewa tanah/bangunan, karcis masuk dan es balok dalam upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁴⁰

UPTD TPI Rajawali terletak di Jl. Rajawali No. 14 yang dibangun dengan tujuan untuk menciptakan fasilitas tempat pelelangan/penjualan ikan hasil tangkapan nelayan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi nelayan. UPTD TPI Rajawali memiliki luas lahan ± 4.259 M2 yang dilengkapi dengan fasilitas sarana air bersih, bangunan sentra kuliner, , mesin

⁴⁰ Sartika, Marzuki 2017. *Pemerintah Kota makassar rencanakan pengembangan TPI Rajawali.*(Rakyatku. Makassar) h,1

penyemprot air, mesin penyemprot penghilang bau, mesin pompa air (sumur bor), pabrik es flake, alat pemecah es balok, genset, dan bangunan pelataran tempat penjualan ikan kios atau lapak yang berfungsi sebagai tempat pemasaran dan distribusi ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan yang akan didistribusikan baik kepada distributor langsung maupun ke konsumen.⁴¹

2. Fungsi dan Tujuan UPTD PTI Rajawali

a. Fungsi

1. Pusat pengembangan masyarakat nelayan
2. Tempat mendaratkan ikan hasil tangkapan
3. Tempat mendaratkan perahu/kapal nelayan
4. Tempat pelaksanaan pembinaan hasil tangkapan
5. Tempat memuat bekal bagi para nelayan
6. Tempat pemasaran dan pendistribusian hasil tangkapan

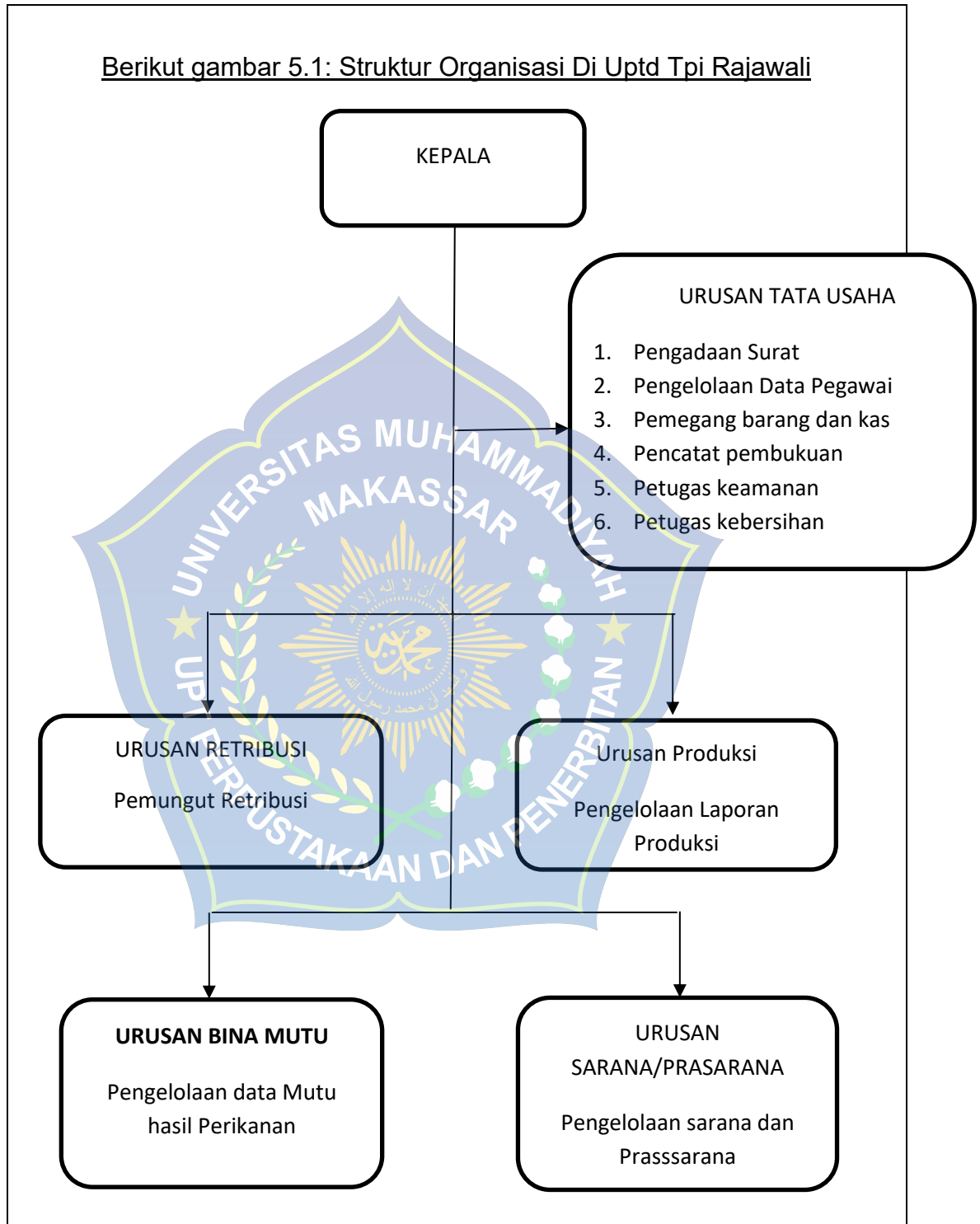
b. Tujuan

Tujuan dari UPTD TPI Rajawali adalah terwujudnya pelaksanaan kegiatan operasional yang terarah sesuai dengan pemamfaatannya sebagai salah-satu sarana yang sangat menunjang usaha nelayan, pengelolaan ikan dalam memasarkan hasil tangkapan nelayan.

⁴¹ Sartika, Marzuki 2017. *Pemerintah Kota makassar rencanakan pengembangan TPI Rajawali*. (Rakyatku. Makassar) h,1

3. Struktur Organisasi

Berikut gambar 5.1: Struktur Organisasi Di Uptd Tpi Rajawali



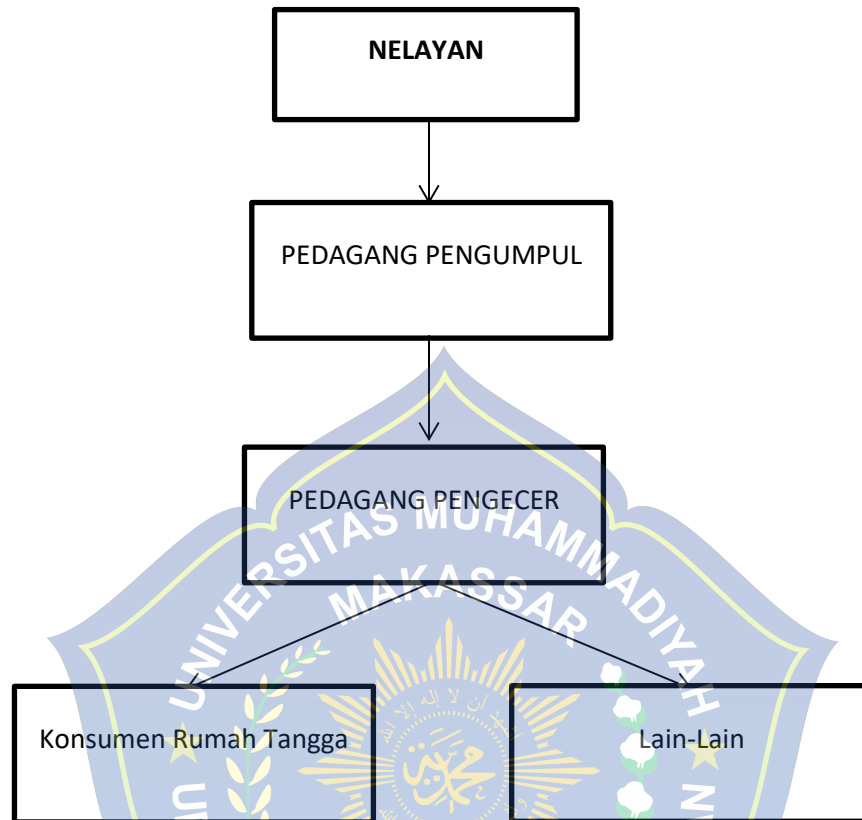
Sumber: Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelayanan Ikan (TPI) Rajawali

4. Proses Transaksi dan Sistem Pemasaran

Proses transaksi hasil tangkapan nelayan di UPTD TPI Rajawali dilakukan dengan cara hampir sama dengan proses-proses transaksi di berbagai wilayah pesisir di Sulawesi Selatan. Cara proses bertransaksi yang ada secara umum, dimana nelayan yang memiliki ikatan dengan pedagang pengumpul (Ponggawa), maka hasil tangkapannya di pasarkan kepada pedagang pengumpul itu, tp kalau tidak memiliki ikatan maka nelayan bebas memasarkan hasil tangkapannya dengan pedagang pengumpul, maupun pedagang yang datang di tengah laut atau yang biasa di temui di laut.

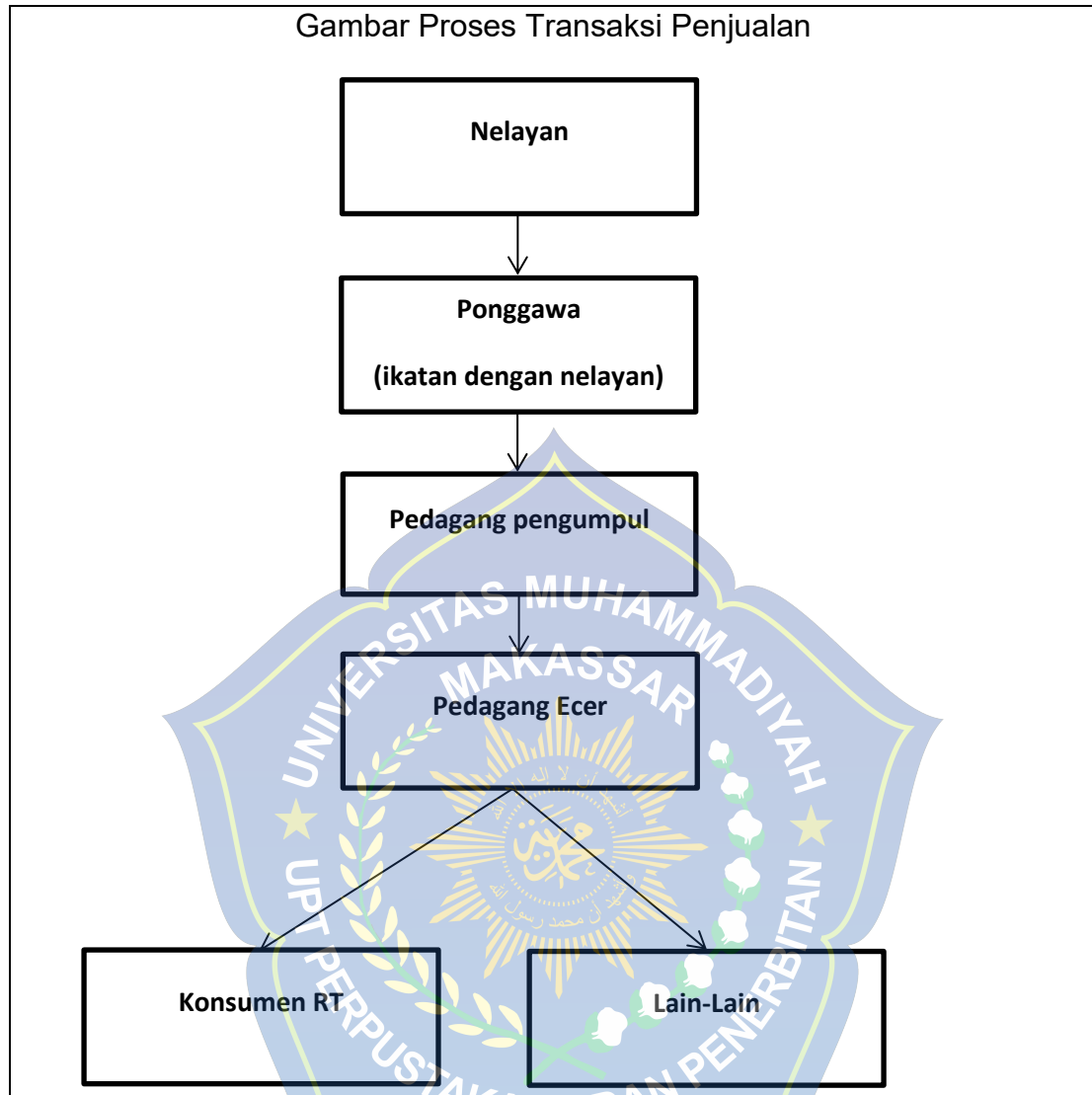
Penjelasan mengenai proses transaksi atau sistem pemasaran yang ada di UPTD TPI Rajawali adalah sebagai berikut; Proses transaksi dan sistem pemasaran di UPTD PTI Rajawali sebelum di produksi adalah dimana nelayan mulai melakukan pencarian ketitik ikan lalu dimulai penangkapan ada nelayan yang menangkap dengan jaring, pancing dan segala jenis upaya yang dilakukan oleh nelayan dalam menangkap ikan. setelah itu, nelayan pulang dan menyandarkan perahu/kapalnya di pelabuhan, dan dipelabuhan sudah ada pedagang pengumpul (Ponggawa) yang menunggu, kemudian terjadi tawar menawar antara nelayan dan pedagang pengumpul, setelah disetujui harganya pedagang pengumpul menawari pedagang eceran yang harganya sudah ditentukan untuk mendapatkan keuntungan.

Berikut Gambar 5.2 dari transaksi penjualan sebagai berikut



Sumber: UPTD TPI Rajawali

a) Proses transaksi juga dilakukan di atas kapal, proses transaksi seperti ini adalah ketika kapal nelayan sudah sandar kemudian ponggawa (Pedagang pengumpul yang memiliki ikatan dengan nelayan) menawarkan ikan, lalu pun ponggawa (Pedagang pengumpul yang memiliki ikatan dengan nelayan) menjual ikan kepada pedagang pengumpul dengan harga tinggi, setelah pedagang pengumpul memiliki ikan dalam jumlah yang banyak selanjutnya di jual kepada pedagang pengecer untuk di jual secara eceran di jual kembali untuk pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga (RT)



Sumber: UPTD TPI Rajawali

Sistem pemasaran di UPTD tempat pelelangan ikan (TPI) Rajawali adalah sistem pemasaran terbuka, dimana produksi dan hasil tangkapan di jual secara cash dan langsung kepada pengepul, pengepul menjual atau melelang langsung kepada pedagang bakul atau pengusaha perikanan,

dengan demikian nelayan tidak menanggung resiko jika ikan hasil tangkapan tidak dapat di pasarkan atau ikan tersebut rusak/busuk.

B. Tingkat Kemiskinan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana laki atau perempuan, kelompok atau perseorangan tidak terpenuhi hak-haknya untuk bertahan hidup.

Badan pusat statistik telah merilis Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2019 yakni sebagai berikut:

Tabel 5.2 Upah Minimum Kota

PROVINSI	KETERANGAN			
	Kabupaten / Kota Madya	2019 (RP)	Persentase Kenaikan (%)	SK Gubernur
Sulawesi Selatan	Kota Makassar	2.860.382	8%	Surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2834/X/2018

Sumber. BPS Kota Makassar

Berdasarkan tabel 5.2 dapat ditarik kesimpulan bahwa Upah minimum Kota untuk Wilayah Makassar adalah Rp;2.860.000, angka itu menjadi acuan dalam menentukan kemiskinan di kota Makassar, atau pendapatan di bawah Rp;2.860.000 masuk dalam kategori miskin, dan pendapatan di atas Rp; 2.860.000 masuk dalam kategori masyarakat mampu.

Hak-hak yang diakui secara umum adalah meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rumah, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa nyaman, bebas dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan dan hak untuk ikut dalam partisipasi dalam kehidupan sosial. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri sebab antara satu sama lain sama-sama mempengaruhi.

Menurut Muhammad Ali selaku Staff Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Dalam mengukur kemiskinan harus dilihat dari rendahnya pendapatan perbulan di bawah upah minimum reguler yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau dilihat dari pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain dan biasanya orang yang dianggap miskin itu dengan cara membandingkan jumlah pendapatan dengan jumlah tanggungan di dalam keluarga”.⁴²

Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan dari bapak Muhammad Ali bahwa untuk dapat sebuah tingkat kemiskinan dilihat dari rendahnya pendapatan perbulan dibawah upah minimum reguler yang sudah ditetapkan

⁴² Muhammad Ali. (Staff Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali. *Wawancara*, Rajawali. Makassar 02 oktober 2019

oleh pemerintah atau bisa juga dilihat dari jumlah kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari apakah sesuai antara pendapatan dan jumlah tanggungan.

Menurut Daeng Narang salah- satu warga yang tinggal di sekitaran UPTD TPI Rajawali Rajawali mengatakan,

“Kemiskinan ada karena tidak seimbang antara memperoleh dan menggunakan Sumber daya alam, kurangnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah”.⁴³

Hal yang disampaikan oleh Daeng Narang diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Suparlan, yakni Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya alam, permasalahan kemiskinan sangat kompleks karena dalam kenyataannya kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan kemampuan semua aspek yang di punyai manusia dalam kehidupannya.⁴⁴

Daeng Narang Daeng Narang, salah- satu warga yang tinggal di sekitaran UPTD TPI Rajawali kembali mengatakan,

“Apabila hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dianggap sebagai orang miskin berarti bisa juga dilihat dari keadaan tempat tinggalnya yang pada dasarnya meskipun tinggal di tengah-tengah kota tetapi memiliki rumah yang beralas tanah, menggunakan dinding dari tripleks dan beratap seng yang bocor, maka dia masuk dalam kategori miskin”.⁴⁵

⁴³ Daeng Narang, Warga. *Wawancara*. Rajawali. Makassar 02 Oktober 2019

⁴⁴ Parsudi Suparlan, 1995 *Kemiskinan di Perkotaan* (yayasan Obor Indonesia) h,13

⁴⁵ Daeng Narang, Warga. *Wawancara*. Rajawali. Makassar 02 Oktober 2019

Keterangan dari Daeng Narang ini dapat di tarik kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan dapat di liat dari tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan tidak memiliki rumah yang layak atau terpenuhinya sandang, pangan dan papan.

Wahgiran pedagang es buah di depan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Salah-satu penyebab kemiskinan karena keterampilan masyarakat yang kurang mengakibatkan seseorang mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di kerjakan. Contohnya kaum wanita bekerja sebagai tukang parkir, mengemis, mengamen, memulung, wanita seharusnya tinggal dirumah dan mengerjakan pekerjaan rumah bukan menjadi tukang parkir”⁴⁶

Berdasarkan dari apa yang telah dikatakan oleh Wahgiran dapat disimpulkan bahwa Kemiskinan adalah kondisi masyarakat yang mengerjakan suatu pekerjaan tidak sesuai dengan yang seharusnya di lakukan seperti mengemis, mengamen, memulung, dll. Dan jika di perhatikan mereka yang mengemis, mengamen, dan memulung masih memiliki fisik yang mampu bekerja dengan layak. Kemudian penulis membenarkan apa yang dikatakan *Wahgiran* karena penulis temui di lokasi tempat kerja penulis, dimana wanita bekerja menjadi buruh bangunan, dan wanita-wanita seakan menjadi tulang punggung keluarga.

Ketidak merataan lapangan kerja salah-satu pemicu maraknya pengangguran dimana-mana ini menjadi masalah serius yan harus di

⁴⁶ Daeng Narang, Warga. *Wawancara*. Rajawali, Makassar 02 Oktober 2019

selesaikan oleh pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Makassar. Muhammad ali Staff Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali kembali mengatakan,

“Ketidak merataan lapangan kerja memunculkan pengangguran dan pengangguran sekarang terjadi dimana-mana salah-satu penyebab kemiskinan yang begitu tinggi, untuk itu peran pemerintah perlu membuat program pengentasan kemiskinan sehingga mampu menekan kemiskinan atau setidaknya dapat meminimalisir kemiskinan”.⁴⁷

Apa yang dikatakan bapak Muhammad Ali dapat di pahami bahwa banyaknya pengangguran yang terjadi dan diharapkan kepada pemerintah kota makassar untuk membuat program yang dapat mengentaskan kemiskinan dan atau paling tidak dapat meminimalisir kemiskinan di kota makassar khususnya masyarakat yang bekerja di UPTD TPI Rajawali.

Ruslan Dg. Alle Pedagang ikan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Kendala pedagang di UPTD TPI Rajawali adalah Modal usaha yang tidak ada, sehingga para pedagang pergi ke bank untuk meminjam uang yang dijadikan sebagai modal usaha bagi para pedagang”.⁴⁸

Apa yang dikatakan oleh bapak Ruslan Dg. Alle dapat kita simpulkan bahwa tidak adanya modal usaha adalah salah-satu kendala bagi

⁴⁷ Muhammad Ali. Staff Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali *Wawancara*. Rajawali, Makassar 02 Oktober 2019

⁴⁸ Ruslan Dg. Alle. Pedagang Ikan. *Wawancara*. Rajawali, Makassar 15 Oktober 2019

para pedagang di UPTD TPI Rajawali, sehingga masyarakat yang ingin berdagang terlebih dahulu pergi ke bank untuk meminjam modal usaha.

Muhammad Ali Staff Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Pendapatan warga di UPTD TPI Rajawali bersifat dinamis, kadang-kadang berubah-ubah sebab ikan yang di dapat nelayan bersifat musiman dalam sebulan dapat dirincikan sebagai 20 hari hasil pendapatan nelayan meningkat dan 10 hari pendapatan menurun (Sedikit), dan seringnya terjadi kerusakan mesin atau perahu kapal yang digunakan.⁴⁹

Jadi dapat disimpulkan apa yang dikatakan oleh bapak Muhammad Ali bahwa pendapatan pedagang di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali bersifat dinamis (berubah-ubah) hal ini disebabkan pendapatan nelayan yang tidak menentu di karenakan cuaca yang kadang baik dan kadang buruk selain itu kondisi yang lain adalah kerusakan mesin atau kapal yang digunakan.

Daeng Narang, salah- satu warga yang tinggal di sekitaran Staff Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Juga mengatakan,

“Pendapatan yang tidak menentu yang di dapatkan oleh pedagang ikan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali kadang di bawah Rp;100.000/hari dan paling banyak Rp; 150.000 pada hari-hari biasanya, dan pendapatan pedagang meningkat pada hari sabtu dan ahad (akhir pekan).⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Ali. Staff Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali *Wawancara*. Rajawali, Makassar 02 Oktober 2019

⁵⁰ Daeng Narang. Warga. *Wawancara*. Rajawali, Makassar 15 Oktober 2019

Dapat disimpulkan apa yang dikatakan oleh daeng Narang bahwa pendapatan pedagang berada diantara kisaran Rp;100.000 sampai Rp; 150.000 dan pendapatan pedagang akan meningkat pada akhir pekan yaitu hari sabtu dan ahad.

Kemiskinan warga di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali merupakan salah-satu masalah-masalah yang penting untuk diatasi dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, maka dari itu upaya dari pemerintah kota makassar sangat di perlukan. Menurut Soejono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peran.⁵¹

Dibalik pendapatan para pedagang yang bisa di katakan sedikit, para pedagang masih dapat saling tolong menolong. Ruslan Dg. Alle Pedagang ikan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Yang saya sangat sukai di sini adalaha para pedagang saling tolong menolong dalam menyelesaikan maslah, salah-satunya adalah memberikan pinjaman kepada teman-teman yang lain (Pedagang) untuk diberikan pinjaman uang jika ada yang sangat membutuhkan, memberikan saran dan solusi untuk masalah yang sedang di hadapi

⁵¹ Soejono Soekanto,1982 Memperkenalkan sosiologi, (Jakarta : CV.Rajawali.) h.29

oleh teman-teman (Pedagang) dan disini kita sudah layaknya seperti saudara.⁵²

Jadi dapat kita pahami apa yang dikatakan oleh bapak Ruslan Dg. Alle adalah para pedagang di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali sudah selayaknya keluarga besar, jika salah-satu diantaranya ada yang membutuhkan bantuan maka pedagang yang lain akan dengan senang hati untuk menolong/membantu pedagang yang berada dalam kesulitan.

Kemiskinan adalah masalah sosial tetapi penyebabnya dan bagaimana mengatasi kemiskinan sudah di upayakan oleh pemerintah, sudah berbagai cara yang di gunakan pemerintah dalam mengatsi kemiskinan namun belum bisa memberantas kemiskinan sebab kemiskinan adalah salah-satu masalah yang sangat mustahil untuk di berantas.

Ramli Pedagang ikan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Pendapatan murni para pedagang disini adalah Rp; 100.000 dan kalau ditanyakan apakah cukup atau tidak maka jawabannya di cukupkan saja apalagi hasil dagangan masih harus dibagi untuk pembayaran modal awal di bank ”.⁵³

⁵² Ruslan Dg. Alle. Pedagang ikan *Wawancara*.Rajawali, Makassar 02 Oktober 2019

⁵³ Ramli. Pedagang Ikan *Wawancara*. Rajawali Makassar 15 oktober 2019

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan para pedagang yang terbilang sedikit yaitu Rp; 100.000 dimana jumlah itu adalah murni pendapatan pedagang dan yang harus di garis bawah adalah jumlah itu belum termasuk modal usaha yang harus di bayar di bank.

Kemiskinan dan pengangguran adalah 2 masalah yang tidak bisa di pisahkan satu sama lain, Wahgiran Pedagang es cendol di depan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali kembali mengatakan,

“Hubungan kemsikinan dengan pengangguran sangat erat kaitannya sebab pengangguran mengurangi tingkat kesejahteraan dan meningkatkan peluang untuk selalu berada dalam ketidak mampuan dikarenakan tidak memiliki pendapatan”.⁵⁴

Setelah Wahgiran berbicara, Muhammad Ali Staff Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali kembali mengeluarkan pendapatnya,

“Pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, keadaan pendapatan meyebabkan penganggur harus mengurangi komsumsinya. Apabila kondisi pengangguran suatu negara buruk maka kesejahteraan bagi masyarakat tak akan pernah terwujud”.⁵⁵

Apa yang kemudian di sampaikan oleh *Wahgiran dan Muhammad Ali* sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sadono Sukirno (2004), Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang

⁵⁴ Wahgiran.Pedagang es Cendol. *Wawancara*. Rajawali. Makassar. 02 oktober 2019

⁵⁵ Muhammad Ali. Staff Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali *Wawancara*, Rajawali Makassar. 02 Oktober 2019

pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang mereka untuk tetap terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik, dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang”.⁵⁶

Muhammad Ali Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Rajawali kembali mengatakan,

“Pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, keadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi konsumsinya. Apabila kondisi pengangguran suatu negara buruk maka kesejahteraan bagi masyarakat tak akan pernah terwujud”.⁵⁷

Apa yang di kemukakan oleh bapak Muhammad Ali dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah sebuah penyakit dalam sebuah negara, sebab banyak masalah yang dapat di timbulkan baik masalah ekonomi maupun masalah sosial.

C. Tingkat Aksi Premanisme di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali

Seperti yang telah di bahas dalam bab sebelumnya, Preman adalah partikelir swasta, penodong, perampok, pemeras dan seterusnya.

⁵⁶ Sadono Sukirno, 2004. *Pengantar teori Ekonomi, edisi ke-3 (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta)* h,271

⁵⁷ Muhammad Ali. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali *Wawancara*. Rajawali. Makassar. 02 Oktober 2019

Premanisme adalah cara atau gaya hidup seperti preman dengan mengedepankan kekerasan.

Minimnya lapangan kerja, tidak meratanya pembangunan menjadi salah-satu faktor utama terjadinya aksi premanisme belakangan ini.

Wahgiran Pedagang es cendol depan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Rajawali mengatakan,

“Motif utama aksi Premanisme pada umumnya berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan, seseorang akan bersikap egois disaat kebutuhannya tidak terpenuhi dan kebanyakan yang terjadi adalah memaksakan kehendak dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya”.⁵⁸

Dari pernyataan bapak Wahgiran dapat di simpulkan bahwa sifat egois karena tidak terpenuhinya kebutuhan primer (Sandang, pangan dan papan) adalah salah-satu menjadi pemicu terjadinya tindak aksi premanisme karena ada unsur pemaksaan kehendak serta menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.

Ramli pedagang Ikan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali berpendapat bahwa,

“Aksi premanisme sebenarnya merupakan sikap merendahkan orang lain, malas, menyalahkan keadaan tak punya keahlian dipadu dengan keinginan cepat kaya dan mau enakya saja”.⁵⁹

⁵⁸ Wahgiran. Pedagang es cendol. *Wawancara*. Rajawali. Makassar 15 Oktober 2019

⁵⁹ Ramli. Pedagang Ikan. *Wawancara*. Rajawali. Makassar 15 Oktober 2019

Maksud dari Ramli dapat kita simpulkan bahwa aksi premanisme sebenarnya adalah salah satu bentuk sikap merendahkan orang lain seperti membuli, mengejek dan menghina. Juga merupakan bentuk kemalasan yaitu ketidak inginan untuk melakukan suatu keterampilan. Ingin cepat kaya dan mau enaknya saja adalah salah-satu bentuk pemikiran yang sangat singkat dan rela melakukan hal yang singkat dan cepat untuk kaya dan mendapatkan uang dengan cepat.

Hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan manusia, hukum merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai keadilan, bermanfaat dan kemanusiaan, dan setelah kita melihat tindakan aksi premanisme maka akan nampak suatu perbuatan yang tercela.

Wahgiran pedagang es cendol depan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Tingkat aksi premanisme saat ini masih tergolong tinggi sebab tindakan-tindakan yang merugikan orang masih sering di jumpai sebagai contoh parkir, seharusnya kita bayar 2.000 tapi karna tindakan premanisme kita jadi bayar 5.000, Hal-hal kecil seperti harusnya menjadi perhatian dari pemerintah, sebab jika tidak di tindak lanjuti secepatnya maka aksi-aksi premanisme akan terus terjadi dan merugikan orang lain”.⁶⁰

Jadi apa yang disampaikan oleh bapak Wahgiran dapat di tarik kesimpulan bahwa tingkat premanisme masih sangat tinggi sebab masih banyak dan marak aksi-aksi premanisme yang merugikan orang lain. Motif

⁶⁰ Wahgiran. Pedagang es cendol. *Wawancara*. Rajawali. Makassar 14 Oktober 2019

aksi premanisme sering berkaitan dengan kebutuhan primer, dan sifat egois sering menjadi faktor momok sehingga terjadi aksi premanisme, pak ismail juga menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan sebab jika di biarkan maka kerugian akan semakin besar.

Daeng Narang, salah- satu warga yang tinggal di sekitaran Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Mengatakan,

“Bentuk aksi premanisme yang muncul saat ini seakan menjadi penyakit sosial yang berasal dari kurangnya mental manusia bahkan bentuk aksi premanisme muncul karena adanya sebuah tekanan perekonomian, maraknya ketidakadilan dan kurangnya keterampilan”.⁶¹

Jadi apa yang dikatakan Daeng Narang dapat ditarik kesimpulan yaitu tekanan perekonomian, maraknya ketidak adilan dan kurangnya keterampilan adalah penyakit sosial yang berakibat jatuhnya mental, sehingga yang terjadi adalah tindakan premanisme semakin merajalela. Dan yang harus digaris bawahi adalah penegakan hukum yang lemah juga menjadi salah-satu penyebab terjadinya dan maraknya aksi premanisme.

Premanisme dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya, misalnya pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka Preman dapat dikenakan Pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang berbunyi (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

⁶¹ Daeng Narang. Warga. *Wawancara*. Rajawali.Makassar 14 Oktober 2019

atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.⁶²

D. Hubungan Kemiskinan Terhadap Aksi Premanisme

Masyarakat miskin saraf akan aksi premanisme dan premanisme tidak bisa dipisahkan dari kemiskinan, dan harus di akui bahwa kemiskinan dan aksi premanisme tidak bisa di pisahkan bagaikan rantai lingkaran setan yang sulit untuk di hapus.

Muhammad Ali Staff di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Pengangguran dan kemiskinan bagaikan Rama dan sinta yang sulit dan mustahil untuk di pisahkan apalagi di hapus. Dan tindakan premanisme ibarat anak kandung yang lahir dari pengangguran dan kemiskinan serta ketimpangan dan kecemburuan sosial tak dapat dihindari. Selama kemiskinan belum di bisa diberantas maka tak usah heran jika aksi-aksi premanisme akan tetap ada dan berkecimpung di tengah-tengah masyarakat”.⁶³

Dapat kita simpulkan apa yang dikatakan oleh bapak Muhammad Ali adalah ketimpangan dan kecemburuan sosial merupakan buah dari pengangguran dan kemiskinan yang sangat sulit untuk dihilangkan apalagi

⁶² Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (Cet. 8; jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 226

⁶³ Muhammad Ali. Staff Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali *Wawancara*.Rajawali. 02 Oktober 2019

untuk diberantas dan aksi premanisme adalah salah-satu bentuk dampak dari ketimpangan yang terjadi.

Masalah utama mengapa kemiskinan masih menjadi momok di tengah negeri ini adalah memang harus diakui peruntukan modal bagi masyarakat miskin memang sangat terbatas. Selain itu pula bersamaan dengan masalah tersebut, usaha kecil dan menengah yang dikhususkan bagi masyarakat miskin juga mendatangkan problematika tersendiri.

Wahgiran Pedagang es cendol di depan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Hubungan kemiskinan dengan aksi premanisme dapat dikatakan sangat erat, dimana kondisi hidup miskin cenderung membuat orang lebih berani melakukan tindak kejahatan karena hal itu terdorong dari keadaan hidupnya yang serba kekurangan sehingga mereka tidak berfikir panjang sebelum melakukan suatu perbuatan, termasuk melakukan tindakan melanggar hukum, hal ini di karenakan mental yang kurang”⁶⁴

Dapat disimpulkan apa yang dikatakan oleh Wahgiran adalah aksi premanisme dan kemiskinan memiliki kaitan yang sangat erat dapat dilihat dari pengaruh berbagai kondisi salah-satunya adalah kondisi ekonomi seperti tidak terpenuhinya kebutuhan dan tuntutan hidup yang layak yang mendorong maraknya kejadian atau aksi premanisme yang terjadi yang disebabkan kurangnya mental.

⁶⁴ Wahgiran. Pedagang es Cendol. *Wawancara*, Rajawali. Makassar 15 Oktober 2019

Ramli Pedagang Ikan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali juga mengemukakan pendapatnya, beliau mengatakan,

“Hubungan kemiskinan dengan aksi premanisme sangat memiliki hubungan yang erat jika seseorang yang bersangkutan berada dalam kemiskinan akan mengerahkan segala upaya untuk mendapatkannya, termasuk dengan cara-cara yang tidak lazim seperti melakukan berbagai tindak kejahatan. Dengan kata lain, selama kemiskinan belum terentaskan, maka angka kriminalitas tetap akan terus menjulang tinggi”⁶⁵

Dapat disimpulkan apa yang dikatakan oleh bapak ramli bahwa kondisi masyarakat miskin yang tinggi maka angka kriminal juga akan ikut tinggi inilah penyebab kemiskinan dan aksi premanisme memiliki ikatan yang sangat erat.

Ruslan Dg. Alle Pedagang Ikan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali juga mengeluarkan pendapatnya, beliau mengatakan,

“Hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme adalah maraknya ketidakadilan sosial, banyak orang yang menanggikan orang membantu orang miskin tidak bermamfaat selama sistem yang di anut di negara ini sitem kuno yaitu menggunakan sistem penindasan, yang perlu di garis bawah adalah orang miskin tidak lemah tetapi orang miskin di lemahkan sehingga sulit bagi orang-orang miskin untuk bangkit”.⁶⁶

⁶⁵ Ramli. Pedagang Ikan. *Wawancara. Rajawali*. Makassar 15 Oktober 2019

⁶⁶ Ruslan Dg. Alle. Pedagang ikan. *Wawancara. Rajawali*. Makassar 15 Oktober 2019

Dapat dipahami apa yang disampaikan oleh bapak Ruslan Dg. Alle bahwa hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme ada pada ketidakadilan sosial sebab kebanyakan masyarakat yang ingin membantu merasa sia-sia dan tidak berguna membantu orang miskin, hal ini dikarenakan sistem yang digunakan oleh negara adalah sistem penindasan terhadap masyarakat miskin, apalagi realitas saat ini berbicara dimana orang miskin dipaksa dan dituntut untuk tetap miskin sehingga ini menjadi masyarakat miskin sangat kesulitan untuk bangkit.

Ramli Pedagang Ikan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Hubungan kemiskinan terhadap aksi Premanisme adalah dimana kondisi ekonomi yang serba kekurangan yang membuat seseorang berani untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain”.⁶⁷

Jadi berdasarkan pernyataan pak ramli dapat dipahami bahwa hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme ada pada kondisi ekonomi, berada dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan akan mengakibatkan seseorang untuk berani bertindak di luar batas demi dalam memenuhi kebutuhannya.

Muhammad Ali Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

⁶⁷ Ramli. Pedagang Ikan. *Wawancara*. Rajawali. Makassar 15 Oktober 2019.

“Intinya hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme adalah kemiskinan memiliki pengaruh yang cukup besar sebab kemiskinan merupakan salah-satu pemicu utama untuk melakukan tindakan premanisme, begitu pun sebaliknya premanisme dapat memiskinkan orang-orang melalui tindakannya seperti pemerasan dan lain-lain.”⁶⁸

Jadi apa yang dikatakan oleh Muhammad Ali dapat disimpulkan bahwa hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme memiliki pengaruh yang cukup besar karena kemiskinan merupakan pemicu utama untuk melakukan tindakan premanisme dan begitu pun sebaliknya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme adalah sebagai berikut;

1. Masyarakat Sulit Memenuhi Kebutuhan Sehari-Hari (Sandang dan Pangan)

Inilah yang menyebabkan kemiskinan menjadi salah-satu masalah ekonomi dan sosial, kemiskinan adalah satu penyebab utama orang-orang atau pemuda generasi tidak mendapatkan pendidikan yang layak yang mengakibatkan kualitas menjadi rendah.

Ramli Pedagang ikan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Masyarakat yang tergolong miskin adalah orang-orang memiliki peluang besar untuk melakukan tindakan kejahatan sebab ditengah-tengah keterbatasan ekonomi, mereka harus memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Sehingga yang terjadi masyarakat miskin cenderung

⁶⁸ Muhammad Ali. (Staff Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali. 02 Oktober 2019

memilih pekerjaan ilegal dan sangat berisiko. Namun memiliki pendapatan yang cukup besar dibandingkan dengan pekerjaan yang legal”.⁶⁹

2. Lingkungan

Muhammad Ali Staff Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Lingkungan adalah salah-satu faktor yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku menyimpang dari aturan. Tinggal di lingkungan kumuh dan kurangnya kesadaran masyarakat setempat, keluarga yang tidak peduli (acuh tak acuh) dan pelaku sering bergaul dengan para pelaku kejahatan”.⁷⁰

3. Pendidikan rendah

Daeng Narang sala-satu warga yang tinggal di sekitar UPTD TPI Rajawali mengatkan,

“Pendidikan adalah satu pembeda yang cukup dan sangat signifikan bagi seseorang yang ingin melakukan kejahatan atau telah melakukan kejahatan untuk itu pentingnya pendidikan bagi kehidupan adalah pendidikan mampu merubah dan memiliki pola pikir yang terstruktur dan merasionalkan dengan fenomena Fakta-fakta yang ada”.⁷¹

4. Mental

Mentalitas, kondisi hidup yang berada dalam ketidak mampuan atau berada dalam kemiskinan, cenderung menjadi pemicu utama seseorang untuk berani melakukan tindakan melanggar hukum. Ruslan Dg. Alle

⁶⁹ Ramli. Pedagang Ikan. *Wawancara*. Rajawali. Makassar 15 Oktober 2019

⁷⁰ Muhammad Ali. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali *Wawancara*. Rajawali. Makassar 02 Oktober 2019

⁷¹ Daeng Narang.Warga. *Wawancara*. Rajawali. Makassar. Makassar 15 Oktober 2019

pedagang ikan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pelelangan

Ikan (TPI) Rajawali mengatakan,

“Sikap serakah tanpa disertai dengan usaha, dan ketekungan dalam berusaha serta berdoa, keputusan-asaan yang selalu dirasakan, tidak bersyukur atas apa yang di dapatkannya adalah salah-satu tanda orang tersebut lupa atau tidak tahu akan tujuan manusia di ciptakan. Atau jika dipersingkat yaitu : “Jika seseorang berusaha maka akan banyak cobaan dan resiko pasang dan surut yang di dapatkan sedangkan aksi premanisme tidak perlu tahu menahu akan kondisi yang sedang di palak (entah orang itu sakit, sangat membutuhkan uang dll. Pelaku aksi premanisme tidak peduli)”.⁷²



⁷² Ruslan Dg Alle. Pedagang Ikan. *Wawancara*. Rajawali. Makassar. 02 Oktober 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan aksi premanisme di Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali dapat dilihat dari rendahnya pendapatan perbulan di bawah upah minimum reguler yang telah di tetapkan oleh pemerintah atau di lihat dari pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat dilihat dari akun Badan Pusat Statistik Kota Makassar dimana tertera bahwa minimal pendapatan kota adalah Rp; 2.860.382, Jika pendapatan seseorang dibawah dari yang tertera maka masuk dalam kategori miskin.
2. Tingkat premanisme di Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali akan tetap tinggi jika kemiskinan masih tinggi, sebab pemicu utama aksi premanisme adalah ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan secara halal, ketidak merataan keadilan dimana-mana, mentalitas yang kurang dan lapangan kerja yang masih tergolong sangat kurang. Dan langkah dalam pemberantasan tindak premanisme yang dapat di tempuh adalah membuat sebuah stabilitas perekonomian kuat.
3. Hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme di Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali adalah sebagai berikut;
 - a. Mentalitas, kondisi hidup yang berada dalam ketidak mampuan atau berada dalam kemiskinan, cenderung menjadi pemicu utama seseorang untuk berani melakukan tindakan melanggar hukum.

- b. Kurangnya modal juga menjadi bagian dari hubungan kemiskinan terhadap aksi premanisme, dimana setiap orang sulit untuk berkreasi dan berketerampilan untuk melakukan usaha dalam merubah taraf kehidupannya.
- c. Kurangnya sikap saling tolong menolong dan ketidak perdulian satu sama lain.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membuat regulasi percepatan untuk meminimalisir kemiskinan agar masyarakat tidak berubah status menjadi pengangguran yang dapat mengurangi pendapatan suatu keluarga, memperbanyak lapangan kerja, dan mensosialisasikan program percepatan kemiskinan.
2. Pemerintah perlu Menerapkan payung hukum yang paten bukan hukum yang bersifat dinamis dalam pemberantasan aksi premanisme yang semakin merajalela, yaitu dengan cara melakukan penataan kembali berbagai institusi hukum melakukan pembaharuan dalam bersikap, dalam berpikir, dan berbagai aspek perilaku dalam masyarakat kearah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
3. Aparat hukum hendaklah bersikap tegas, bijaksana dan konsisten dalam menangani setiap kasus-kasus aksi premanisme.

DAFTAR PUSTAKA

Agus,Sjafari.2014. *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Asy'ari, Musa. 2001.*Keluar dan Krisis Multidimensi*.Yogyakarta: LESFI.

Buletin Da'wah Islam. 2012 (dalam catatannya) *Premanisme Merajalela, Penerapan Syariah Islam dan Solusinya*.

Daeng Narang 2019 Pedagang UPTD TPI Rajawali, 15 Oktober

Fais Almath Muhammad,1991, *1100 Hadist Terpilih*. Bogor Gema Insani Press.

G.W.Bawengan,1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*. PT.Pradnya Paramita: Jakarta.

H, Sutrisno, 1983. *Metodologi Research*. Yogyakarta :Yayasa Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.

Ida Bagus Pujastawa dalam Ali Mustofa Akbar. 2011. *Premanisme Dalam Teori Labeling*.

Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti. 2002. *Ekonomi Pembangunan Syariah*.

Lukman Ali, Dkk. 1996.*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka.

Kunarto. 2002. *Kejahatan Berdimensi Baru*. Jakarta: Cipta Manunggal.

Lexy J Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

L, Rahmawati. 2002. *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme* Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singa perbangsa Studi Sosio Kriminologi.

Makaampoh March F. artikel. *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013.

Muhammad ali. 2019 Staff UPTD TPI Rajawali, 02 Oktober

Moeljatno. 1986. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.

Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry.1994. *Kamus Ilmiah Populer* (Edisi Pertama, Yogyakarta, Arkola.

Parsudi, Suparlan.1995. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ramli. 2019, Pedagang di UPTD TPI Rajawali, 15 Oktober

Risalwan Habdi Lubis. 2018 *Aksi premanisme berlanjut dan kurangnya peran pemerintah. Kompas. 28-29 Oktober*.

Ruslan Dg. Alle 2019. Pedagang di UPTD TPI Rajawali, 02 Oktober.

Rochmin, Dahuri dan Iwan Nugroho.2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, danLingkungan* Jakarta: LP3ES.

Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh Sunnah*.Jilid I Beirut: Dar Al-Fikr.

Sanusi, Husin, 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar lampung.

Syamil Quran.2004 *Al-quranul Karim*. Bandung,Syaamil Cipta Media.

Soekanto, Soerjono.2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Soenarto soerodibroto. 2003. KUPH dan KUHAP di lengkapi Yurisprudensi Mahkamah agung dan Hooge Raad cet.8 Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.

Usman, Sunyoto. 2006.*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf al-Qaradlawi.2002.*Teologi Kemiskinan; Dokrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*.terj. Maimun Syamsuddin. Yogyakarta: MitraPustaka.

Wahgiran. 2019 pedagang es cendol UPTD TPI Rajawali, 02 Oktober